

**ABSTRAK**

**Ahmad Dedy Widyartono, 1620110045, Analisa Yuridis Terhadap Peran Pos Bantuan Hukum Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Pati, Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kudus, 2022.**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Posbakum di Pengadilan Agama Pati yang mengacu pada PERMA No 1 tahun 2014 mengenai layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Pati sangat diperlukan. Dari hasil penelitian masih banyak warga Negara Indonesia yang tidak mampu sangat memerlukan bantuan hukum di Pengadilan dalam hak persamaan di depan hukum, dengan alasan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui MA belum mengatur secara jelas dalam bantuan hukum yaitu mengenai anggaran yang di batasi, serta pelayanan belum terlihat jelas implementasinya yang dilakukan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Pati terhadap masyarakat pencari keadilan. Menanggapi permasalahan tersebut bagaimanakah implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh posbakum di Pengadilan Agama Pati. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Posbakum sebagai salah satu lembaga bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Pengadilan Agama Pati dan mengetahui respon dari masyarakat.

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian dan kemudian dilakukan analisis. Dalam rangka mengumpulkan mengelola dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara pihak terkait, setelah itu dilakukan dengan cara membandingkan hasil studi pustaka dengan penelitian lapangan.

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa Posbakum melayani masyarakat yang tidak mampu, dengan berbagai jasa yang tersedia diantaranya konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum yang diperlukan di persidangan. Posbakum Pengadilan Agama Pati mempunyai strategi dalam penyelesaian jasa anggaran yang di batasi mengenai posbakum dengan cara tidak menghadirkan advokat dalam pemberian layanan Posbakum, walaupun memang tidak maksimal akan tetapi langkah setrategi tersebut bisa mengurangi dampak orang yang tidak bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis ketika anggaran tersebut di batasi.

**Kata Kunci:** *Peran, Posbakum, Masyarakat Tidak Mampu, PERMA No. 1 Tahun 2014*